



MINISTRY OF TRADE
REPUBLIC OF INDONESIA

RENCANA KERJA BIRO PERUNDANG-UNDANGAN PBK, SRG, DAN PLK 2026

**BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI**



MINISTRY OF TRADE
REPUBLIC OF INDONESIA



www.bappebti.go.id



[@bappebti](https://www.instagram.com/bappebti)



[Bappebti Kementerian Perdagangan](https://www.facebook.com/Bappebti.Kementerian.Perdagangan)



[infobappebti](https://twitter.com/infobappebti)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, bahwa penyusunan Rencana Kinerja Biro Perundang-undangan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) Bappebti Tahun Anggaran 2026 telah selesai.

Rencana kinerja ini disusun sebagai bentuk komitmen Biro Perundang-undangan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) untuk melaksanakan Program kerja pada Tahun Anggaran 2026. Agar pelaksanaan Program kerja dapat dinilai dan diukur dengan baik, maka perlu dibuat target-target pengukuran kinerja secara kuantitatif dan kualitatif, sehingga memudahkan untuk melakukan evaluasi kinerjanya. Dalam Rencana Kinerja Biro Perundang-undangan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan target-target untuk sasaran makro dalam Tahun Anggaran 2026 serta indikator kinerja untuk input, output dan outcome yang diambil dari RKA-KL/DIPA Bappebti Tahun Anggaran 2026.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Biro Perundang-undangan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) Tahun Anggaran 2026, semoga pelaksanaan Program Kerja Tahun Anggaran 2026 berjalan sesuai rencana dan tidak ada hambatan.

Akhir kata, semoga Rencana Kinerja Biro Perundang-undangan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) ini dapat bermanfaat dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Biro Perundang-undangan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) pada khususnya dan Bappebti pada umumnya.

Jakarta, Desember 2025

**Kepala Biro Perundang-undangan
PBK, SRG, dan PLK,**



FRANCISKA SIMANJUNTAK

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	4
C. Ruang Lingkup	6
BAB II CAPAIAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA.....	7
Capaian Kinerja Biro Peraturan Perundang- undangan dan Penindakan Tahun 2024.....	7
BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2026.....	19
A. Visi dan Misi	19
B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran.....	19
C. Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan	20
BAB IV PENUTUP.....	24
LAMPIRAN	
-Form Rencana Kerja	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara produsen sekaligus pemasok utama beberapa komoditi primer seperti produk pertanian, perkebunan atau pertambangan yang harganya selalu mengalami fluktuasi. Fluktuasi itu dapat timbul setiap saat serta melekat dalam sistem produksi dan pemasaran komoditi primer.

Dengan semakin menyatunya perekonomian nasional ke dalam tatanan ekonomi dunia, ketatnya persaingan usaha menjadi ciri dalam dinamika perekonomian global yang harus dihadapi perekonomian Indonesia. Semakin ketatnya persaingan usaha memerlukan adanya pengelolaan usaha yang efisien dan efektif. Ketidakpastian pengelolaan usaha tersebut disebabkan antara lain dengan adanya perubahan harga komoditi yang semakin tajam. Gejolak perkembangan harga itu dapat menyulitkan para pelaku ekonomi di tingkat domestik atau internasional dalam upaya melakukan perencanaan kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi. Pada akhirnya, gejolak harga tersebut dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Perubahan harga tersebut akan semakin besar dirasakan akibatnya dengan adanya pengaruh perubahan kurs mata uang, tingkat suku bunga atau inflasi.

Menghadapi permasalahan tersebut, banyak Negara telah mempergunakan secara luas instrumen perdagangan berjangka sebagai sarana pengelolaan resiko akibat adanya fluktuasi harga. Melalui instrumen perdagangan berjangka tersebut, petani produsen dan industri pengguna, eksportir dll, dapat melakukan pengelolaan risiko melalui mekanisme *hedging* agar mereka terhindar kerugian dari fluktuasi harga. Penyelenggaraan perdagangan berjangka yang tertib dan efisien memungkinkan terbentuknya harga suatu komoditi yang menjadi *underlying* kontrak berjangka. Harga yang terjadi dapat dijadikan sebagai acuan bagi petani produsen atau industri pengguna, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam perdagangan komoditi tersebut. Kehadiran perdagangan berjangka juga memberikan alternatif investasi yang menarik karena dengan modal yang relatif terbatas dalam bentuk margin dapat bertransaksi dalam volume transaksi yang

besar.

Namun demikian Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan kegiatan bisnis yang sangat kompleks, beresiko tinggi dan melibatkan banyak pihak di dalamnya. Oleh karena itu diperlukan suatu dasar hukum yang kuat yang dapat memberikan kepastian hukum serta melindungi masyarakat dari praktek perdagangan yang merugikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi ini, maka penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi dapat terlaksana secara teratur, wajar, efisien, dan efektif sehingga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam perkembangannya, perdagangan berjangka tidak terbatas hanya pada komoditi primer seperti produk pertanian dan pertambangan, tetapi telah mencakup berbagai produk yang mempunyai harga atau nilai bisnis seperti indeks saham, suku bunga, mata uang, dll. Demikian pula tempat perdagangannya tidak hanya terjadi di bursa tetapi juga di luar bursa (*over the counter*).

Permasalahan lainnya juga muncul terutama adanya kasus-kasus pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka. Demi tegaknya hukum, maka kasus-kasus tersebut harus mendapat perhatian yang serius yaitu dengan melakukan penegakan hukum. Biro Perundang-undangan PBK, SRG, dan PLK sangat berperan dalam melakukan penegakan hukum di bidang PBK dengan melakukan pemeriksaan dan penyidikan serta melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Diharapkan dengan penanganan kasus-kasus di bidang perdagangan berjangka secara cepat dan tepat, maka kegiatan perdagangan berjangka di Indonesia dapat berjalan dengan tertib dan efisien. Oleh karena itu maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi pun kemudian disempurnakan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Dengan dibentuknya

Undang-Undang ini, diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan terhadap praktik di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi secara global.

Sementara itu, di bidang Sistem Resi Gudang juga diundangkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. Dengan adanya Undang-Undang ini, Sistem Resi Gudang dapat memfasilitasi pemberian kredit bagi dunia usaha dengan agunan inventori atau barang yang disimpan di gudang. Sistem Resi Gudang juga bermanfaat dalam menstabilkan harga pasar dengan memfasilitasi cara penjualan yang dapat dilakukan sepanjang tahun. Di samping itu, Sistem Resi Gudang dapat digunakan oleh Pemerintah untuk pengendalian harga dan persediaan nasional.

Namun, dalam perkembangannya terdapat beberapa kelemahan di lapangan yang sangat menghambat perkembangan Resi Gudang, di antaranya adalah dengan tidak tersedianya mekanisme jaminan yang relatif terjangkau bagi pelaku usaha apabila Pengelola Gudang mengalami pailit atau melakukan kelalaian dalam pengelolaan (*mishandling*) sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya mengembalikan barang yang disimpan di gudang sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang tertera dalam Resi Gudang. Sehingga pada tahun 2011, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang disempurnakan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.

Dengan adanya kedua Undang-Undang tersebut di atas, maka diharapkan Indonesia siap menghadapi tuntutan kebutuhan dunia usaha beserta perubahannya yang sangat cepat sehingga dapat ikut serta berperan aktif di bidang ekonomi khususnya perdagangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, Biro Perundang - undangan PBK, SRG, dan PLK mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan dan penyusunan peraturan dan/atau instrumen hukum lainnya, pemberian pelayanan hukum, dan litigasi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas.

***Biro
Perundang -
undangan
PBK, SRG, dan
PLK Sebagai
Unit Kerja
Yang
Melakukan
Penegakan
Hukum &
pengaturan
PBK, SRG, PLK
dan Pasar Fisik***

Untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan dalam kegiatan Perdagangan Berjangka, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas, maka perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan kepada para pelaku pasar, serta melaksanakan proses hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Fungsi pengaturan dimaksud adalah dalam rangka membuat peraturan pelaksanaan teknis sebagai penjabaran lebih lanjut dari Undang–Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, Biro Perundang-undangan PBK, SRG, dan PLK sebelum adanya perubahan nomenklatur Biro melakukan penegakan hukum terhadap setiap pihak yang diduga baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelanggaran dan/atau yang terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan adanya fungsi pengaturan dan penindakan tersebut maka penyelenggaraan Perdagangan Berjangka, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas dapat terlaksana secara teratur, wajar, tertib, efisien dan efektif, sehingga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi nasional.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

***Struktur
Organisasi Biro
Perundang -
undangan PBK,
SRG, dan PLK***

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Biro Perundang-undangan PBK, SRG, dan PLK mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan dan penyusunan peraturan dan/atau instrumen hukum lainnya, pemberian pelayanan hukum, dan litigasi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Biro Perundang-undangan PBK, SRG, dan PLK Bappebti menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya serta telaahan hukum dan pelayanan hukum di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas;
- b. pelaksanaan pelayanan hukum dan litigasi, penyediaan sarana penyelesaian perselisihan, serta pemberian pendapat hukum

terhadap permasalahan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas;

- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan ketentuan kelembagaan dan kegiatan bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas;
- d. penyiapan rancangan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
- e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan penyusunan instrumen hukum lainnya di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas;
- f. penyiapan pemberian pendapat hukum terhadap permasalahan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas;
- g. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi peraturan perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di Biro Perundang-Undangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas.

Struktur organisasi Biro Peraturan Perundang - undangan dan Penindakan Bappebti

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, struktur organisasi Biro Perundang-undangan PBK, SRG, dan PLK Bappebti terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, ketatalaksanaan, barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, serta fasilitasi reformasi birokrasi, kepatuhan

internal, dan manajemen risiko di Biro Perundang-undangan PBK, SRG, dan PLK.

C. Ruang Lingkup

***Rencana Kerja
2025
menjabarkan
upaya
pencapaian
target***

Rencana Kerja Biro Perundang-undangan PBK, SRG, dan PLK Bappebti Tahun 2026 pada dasarnya adalah gambaran rencana kerja yang diharapkan selama tahun anggaran 2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dikaitkan dengan upaya-upaya yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dalam kerangka pemenuhan misi yang telah ditetapkan.

Ruang lingkup penyusunan Rencana Kerja Tahunan Biro Perundang-undangan PBK, SRG, dan PLK BAPPEBTI Tahun 2026 meliputi:

- Bab I. Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tugas pokok dan fungsi, serta ruang lingkup
- Bab II. Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2024 (terkait dengan tugas dan fungsi)
- Bab III. Rencana Kerja meliputi: Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran dan indikator sasaran, serta Program, Kegiatan dan indikator kegiatan
- Bab IV. Penutup

BAB II

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Capaian Kinerja Biro Perundang-undangan dan Penindakan tahun 2024:

Dari hasil pengukuran yang didapat, rata-rata capaian indikator kinerja utama dalam waktu satu tahun (selama tahun 2024) adalah **103,31% (seratus tiga koma tiga puluh satu persen)**. Hal ini dapat dilihat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti tahun 2024. Dapat dilihat juga nilai capaian realisasi Pagu Biro Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti sebesar **99,15% (sembilan puluh sembilan koma lima belas persen)** menunjukkan bahwa persentase hasil yang dicapai hampir sesuai dengan rencana.

Pencapaian kinerja program dan kegiatan yang sesuai dengan rencana awal

Kilas capaian sasaran kinerja Biro Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti Bappebti Kementerian Perdagangan dari Januari 2024 sampai dengan Desember 2024 sebagai berikut:

Capaian-1:

Persentase Regulasi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas yang di Uji Publik

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan pada kepentingan masyarakat dari praktek-praktek perdagangan yang merugikan serta memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka, maka Bappebti setiap waktu harus mengikuti perkembangan pasar berjangka serta melakukan pengkajian terhadap keadaan yang terjadi tersebut atau peraturan yang ada untuk pembuatan atau penyempurnaan peraturan yang ada.

Pada tahun 2024, ditargetkan Persentase Regulasi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas yang di Uji Publik dikeluarkan sebanyak **6 (enam)** peraturan atau **82% (delapan puluh dua persen)** dan dapat direalisasikan sebanyak **16 (enam belas)** Peraturan Bappebti dan Surat Edaran atau **100% (seratus persen)**. Adapun **16 (enam belas)** Peraturan Bappebti dan Surat Edaran yang dapat direalisasi pada tahun 2024 disajikan pada **Tabel 1**.

Secara keseluruhan IK-1 ini mencapai target sebesar **117,64% (seratus tujuh belas koma enam puluh empat persen)**.

Tabel 1

Peraturan Kepala Bappebti Tahun 2024

No.	Nomor Peraturan Bappebti/Surat Edaran Kepala Bappebti	Judul Peraturan Bappebti/Surat Edaran Kepala Bappebti
1.	Peraturan Bappebti Nomor 1 tahun 2024	Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Bursa Berjangka Dan Kontrak Berjangka Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Dalam Rangka Penyaluran Amanat Nasabah Ke Bursa Berjangka Luar Negeri
2.	Peraturan Bappebti Nomor 2 tahun 2024	tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto;
3.	Peraturan Bappebti Nomor 3 tahun 2024	tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
4.	Peraturan Bappebti Nomor 4 tahun 2024	Pelaksanaan Ujian Profesi Untuk Calon Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka
5.	Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2024	Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Berjangka
6.	Peraturan Bappebti Nomor 6 Tahun 2024	tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perdagangan

		Timah Murni Batangan Melalui Bursa Timah;
7.	Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2024	tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 106/Bappebti/Per/10/2013 tentang Kewajiban Pelaporan Keuangan dan Ketentuan Modal Bersih Disesuaikan Bagi Pialang Berjangka
8.	Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2024	tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka
9.	Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2024	tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka
10.	Peraturan Bappebti Nomor 10 tahun 2024	tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka
11.	Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2024	tentang Tata Cara Pelaksanaan Perdagangan Pasar Fisik Tenaga Listrik Terbarukan di Bursa Berjangka;
12.	Peraturan Bappebti Nomor 12	tentang Penempatan Margin

	Tahun 2024	Untuk Pelaksanaan Transaksi di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi
13.	Surat Edaran Bappebti Nomor 47/BAPPEBTI/SE/03/2024	tentang Penegasan Implementasi Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka
14.	Surat Edaran Bappebti Nomor 64/BAPPEBTI/SE/04/2024	tentang Penegasan Implementasi Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka
15.	Surat Edaran Bappebti Nomor 324.1/BAPPEBTI/SE/11/2024	tentang Pelaksanaan Layanan Perizinan di Bidang Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto
16.	Surat Edaran Bappebti Nomor 374/BAPPEBTI/SE/12/2024	tentang Penegasan Atas Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Derivatif Keuangan Termasuk Aset Kripto Dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia

Sumber data: Biro Perundang-undangan dan Penindakan, Bappebti

IK-1 ini didukung oleh beberapa kegiatan pendukung yaitu:

1. Perumusan, penyempurnaan dan penyusunan peraturan PBK, SRG dan PLK

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan pada kepentingan masyarakat dari praktek-praktek perdagangan yang merugikan serta memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka, maka Bappebti setiap waktu harus mengikuti perkembangan pasar berjangka serta melakukan pengkajian terhadap keadaan yang terjadi tersebut atau peraturan yang ada untuk pembuatan atau penyempurnaan peraturan yang ada..

2. Uji Publik Regulasi di Bidang PBK, SRG dan PLK

Kegiatan uji publik regulasi di bidang PBK, SRG dan PLK ini dilaksanakan untuk menyempurnakan draft regulasi di bidang PBK, SRG dan PLK bersama dengan internal Bappebti, Bursa Berjangka, Lembaga

Kliring Berjangka, Asosiasi Perdagangan Berjangka, Pialang Berjangka, serta Kementerian/Lembaga terkait. Kegiatan Uji Publik Regulasi di bidang PBK, SRG dan PLK pada tahun 2024 telah dilaksanakan sebanyak 16 (enam belas) kali.

3. Kegiatan Pertemuan Teknis Implementasi Ketentuan di bidang PBK, SRG dan PLK

Kegiatan pertemuan teknis implementasi ketentuan di bidang PBK, SRG dan PLK ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi antara Bappebti dengan para pelaku usaha terkait dengan pemahaman tentang ketentuan perdagangan berjangka, ketentuan-ketentuan baru di bidang perdagangan berjangka, inventarisasi permasalahan terkait dengan penerapan peraturan dan sanksi atas pelanggaran ketentuan.

Kegiatan Pertemuan teknis implementasi ketentuan di bidang PBK, SRG dan PLK pada tahun 2024 tidak dilaksanakan.

Capaian-2: Capaian-2 ini mencapai target sebesar **100% (seratus persen)**.

Persentase Realisasi Pengenaan Sanksi atau Penindakan lebih lanjut Berdasarkan Rekomendasi Hasil Identifikasi, Pemeriksaan teknis, Pemeriksaan atau Penyidikan

Pada tahun 2024, Biro Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti mempunyai target Persentase Realisasi Pengenaan Sanksi atau Penindakan lebih lanjut Berdasarkan Rekomendasi Hasil Identifikasi, Pemeriksaan teknis, Pemeriksaan atau Penyidikan pada tahun 2024 melebihi target sebanyak 100% (seratus persen) atau 100% (seratus persen) dari target 2024. Tercapainya indikator tersebut karena realisasi pengenaan sanksi terhadap pelaku usaha sebanyak 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) sanksi dengan jumlah rekomendasi hasil Identifikasi, Pemeriksaan teknis, Pemeriksaan atau Penyidikan dan rekomendasi hasil Pengawasan sebanyak 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) sanksi. Jadi, Persentase Realisasi Pengenaan Sanksi atau Penindakan lebih lanjut Berdasarkan Rekomendasi Hasil Identifikasi, Pemeriksaan teknis, Pemeriksaan atau Penyidikan sebesar 100% (seratus persen). Adapun rincian perusahaannya adalah sebagai berikut:

Pada tahun 2024, Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti telah menjatuhkan sanksi kepada Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi yang melanggar ketentuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi berupa Sanksi Peringatan sebanyak 980 (sembilan

ratus delapan puluh) perusahaan, Pembekuan Pialang Berjangka sebanyak 4 (empat) perusahaan, Pembatasan Pialang Berjangka sebanyak 1 (satu) perusahaan, Sanksi Pencabutan Pialang Berjangka sebanyak 3 (tiga) perusahaan, Pembatalan Kegiatan Usaha sebanyak 4 (empat) perusahaan, Pembatalan Sertifikat Pendaftaran sebanyak 1 (satu) perusahaan dan Pembatalan Persetujuan sebanyak 2 (dua) perusahaan pada tahun 2024.

Berikut adalah daftar rincian perusahaan yang telah dikenakan sanksi Peringatan, Pembekuan Izin Usaha, dan Pencabutan Izin Usaha selama tahun 2024:

Tabel 2
Rekapitulasi Pengenaan Sanksi terhadap Pelaku Usaha Tahun 2024

No.	Jenis Peringatan	Jumlah	Keterangan
1.	Surat Peringatan Integritas Keuangan Pialang/atau Pedagang Berjangka	106	Rekomendasi hasil Pengawasan
2.	Surat Peringatan Integritas Keuangan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto	12	Rekomendasi hasil Pengawasan
3.	Surat Peringatan Market Maker (Volume Transaksi Pialang Berjangka dan Penyelenggara)	98	Rekomendasi hasil Pengawasan
4.	Surat Peringatan Evaluasi Laporan Direktur Kepatuhan	107	Rekomendasi hasil Pengawasan
5.	Surat Peringatan Keterlambatan Penyampaian Laporan (Kegiatan, Transaksi, dan Keuangan) Calon Pedagang Fisik Aset Kripto	299	Rekomendasi hasil Pengawasan
6.	Surat Peringatan Aset Kripto Diluar Ketentuan pada Calon Pedagang Fisik Aset Kripto	2	Rekomendasi hasil Pengawasan
7.	Sanksi Denda atas Keterlambatan Laporan Keuangan Pialang Berjangka, Pedagang Berjangka dan Kliring Berjangka, Pedagang Fisik Emas	95	Rekomendasi hasil Pengawasan
8.	Surat Peringatan Keterlambatan Penyesuaian Margin di Lembaga Kliring Berjangka	25	Rekomendasi hasil Pengawasan
9.	Surat Peringatan Hasil Pemeriksaan Terkait Pengaduan Nasabah Pialang Berjangka dan Evaluasi Calon Pedagang Fisik Aset Kripto	63	Rekomendasi hasil Identifikasi, Pemeriksaan
10.	Surat Peringatan Penyampaian Laporan Nihil DTTOT	35	Rekomendasi hasil Pengawasan
11.	Surat Peringatan Keterlambatan Penyampaian Laporan (Kegiatan dan Transaksi) Pedagang Berjangka (Pialang, Fisik Timah, Fisik Emas, dan Bank)	91	Rekomendasi hasil Pengawasan
12.	Surat Peringatan Keterlambatan Penyampaian Laporan Berkala (Bulanan, Triwulan, Tahunan) Pengelola Gudang	47	Rekomendasi hasil Pengawasan
13.	Sanksi Pembekuan Pialang Berjangka	4	Rekomendasi hasil Audit Bursa dan Kliring serta hasil Identifikasi

14.	Sanksi Pembatasan Pialang Berjangka	1	Rekomendasi hasil Pengawasan
15.	Sanksi Pencabutan Pialang Berjangka	3	Rekomendasi hasil Pengawasan
16.	Sanksi Pembatalan Kegiatan Usaha	4	Rekomendasi hasil Pengawasan
17.	Sanksi Pembatalan Sertifikat Pendaftaran	1	Rekomendasi hasil Pengawasan
18.	Sanksi Pembatalan Persetujuan	2	Rekomendasi hasil Pengawasan
Total		995	

Sumber data: Biro Perundang-undangan dan Penindakan, Bappebti

Adapun faktor penting penyebab keberhasilan terhadap pelaksanaan IK-2 ini adalah karena adanya dukungan penuh dari semua pihak terkait terutama pelaku usaha dan kepolisian di daerah sehingga Bappebti berhasil menjalankan tugasnya sebagai badan pengawas khususnya dalam melakukan identifikasi, pemeriksaan, penyidikan di bidang PBK, SRG, dan PLK.

Beberapa kegiatan penunjang dalam mendukung IK-2 ini adalah:

1. Jumlah Rapat Koordinasi dengan aparat penegak hukum

Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi diantara para aparat penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan dan intansi terkait lainnya dalam rangka penanganan kasus- kasus di bidang PBK. Pada tahun 2024, kegiatan Rapat Koordinasi telah dilaksanakan sebanyak 18 (delapan belas) kali yaitu sebanyak 1 (satu) kali di Aceh, 2 (dua) kali di Surabaya, 1 (satu) kali di Semarang, 3 (tiga) kali di Bogor, 1 (satu) kali di Bali, 2 (dua) kali di Bandung, 2 (dua) kali di Jakarta, 2 (dua) kali di Bekasi dan 4 (empat) kali di Tangerang.

2. Jumlah pemblokiran terhadap website/domain yang tidak memiliki izin

Kegiatan ini sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari penawaran investasi tidak berizin, Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan juga melaksanakan tindakan pencegahan berupa pemblokiran terhadap domain situs web entitas tidak berizin di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Hal ini juga terkait dengan keanggotaan Bappebti dalam Satgas PASTI yang diwakili oleh Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan. Pada tahun 2024 sebanyak 1046 (seribu empat puluh enam) domain situs yang tidak

Capaian-3:

Persentase Pemenuhan Konsultasi Hukum

**tentang
Peraturan di
Bidang PBK,
SRG dan
PLK**

memiliki izin telah di blokir.

Capaian-3 ini mencapai target **92,32% (sembilan puluh dua koma tiga puluh dua persen)**.

Pada tahun 2024 tercapai sebesar 80,32% (delapan puluh empat koma nol tujuh persen) atau 92,32% (sembilan puluh dua koma tiga puluh persen) dari target tahun 2024. Tercapainya indikator tersebut karena banyaknya permintaan konsultasi hukum tentang Peraturan di Bidang PBK, SRG, dan PLK. Kegiatan pemberian konsultasi dan keterangan sebagai saksi ahli memiliki permintaan sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) dokumen dan telah dilaksanakan sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) dokumen terdiri dari 78 (tujuh puluh delapan) kali Saksi / Ahli dan 20 (dua puluh) kali Asistensi Hukum. Sedangkan kegiatan konsultasi hukum yang masih dalam proses sebanyak 24 (dua puluh empat) dokumen.

Pada tahun 2023, kegiatan Konsultasi Hukum tentang Peraturan di Bidang PBK, SRG dan PLK tercapai sebesar 84,07% (delapan puluh empat koma nol tujuh persen) dari target 83% atau dalam presentase sebesar 98,90% (sembilan puluh delapan koma sembilan puluh persen). Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2024 terjadi penurunan sebesar 6,58%. Apabila capaian Persentase Pemenuhan Konsultasi Hukum tentang Peraturan di Bidang PBK, SRG dan PLK dibandingkan dengan target tahun 2024 pada Lampiran Matriks Perubahan Kinerja Pembangunan Terhadap Perubahan Organisasi Kementerian Perdagangan Tahun 2024-2024 yaitu sebesar 87% maka Persentase Pemenuhan Konsultasi Hukum tentang Peraturan di Bidang PBK, SRG dan PLK tahun 2024 terhadap target 2024 sebesar 92.32%.

**Capaian-4:
Persentase
Pemenuhan
Litigasi dan
Penanganan
Perselisihan**

Capaian-4 ini mencapai target **100% (seratus persen)**.

Sedangkan untuk Persentase Pemenuhan Litigasi dan Penanganan Perselisihan, pada tahun 2024 tercapai sebesar **100% (seratus persen)** atau **111,11% (seratus sebelas koma sebelas persen)** dari target tahun 2024. Tercapainya indikator tersebut karena banyaknya panggilan sidang perkara perdata yang melibatkan Bappebti sebagai tergugat atau turut tergugat. Dalam pelaksanaan kegiatan Permintaan Gugatan Hukum dan/atau Pemenuhan Litigasi pada tahun 2024 telah dilaksanakan sebanyak 59 (lima puluh sembilan) kali. Pada tahun 2024 kegiatan Permintaan

dan/atau Pemenuhan Penanganan Perselisihan telah dilaksanakan sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) kali.

Adapun perkara yang telah ditangani oleh Bappebti tahun 2024 disajikan pada table berikut:

Tabel 3.

Perbandingan Jumlah Penanganan Perkara

Indikator Kinerja Utama	TAHUN			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Pemenuhan Litigasi dan Penanganan Perselisihan	28 Dokumen	50 Dokumen	101 Dokumen	59 Dokumen

Capaian-5 :

Persentase

Hasil

Penegakan

dan

Pelayanan

Hukum di

Bidang Aset

Kripto

Persentase hasil penegakan dan pelayanan hukum di bidang aset kripto

Persentase hasil penegakan dan pelayanan hukum di bidang aset kripto merupakan Indikator Kinerja utama yang bertujuan untuk:

1. Memverifikasi informasi yang diperoleh tentang dugaan adanya pelanggaran dan mencari bukti-bukti ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran, serta melaporkan dan memberikan rekomendasi atas hasil dari verifikasi dan pencarian bukti tersebut. Jika diyakini terdapat bukti-bukti yang kuat tentang adanya pelanggaran akan dilakukan ke tahap pemeriksaan atau penyidikan.
2. Mengetahui pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran di bidang Aset Kripto untuk kemudian Bappebti dapat mengenakan sanksi administratif sesuai pelanggaran yang dilakukan.
3. Memastikan adanya suatu pelanggaran tindak pidana di bidang Aset Kripto yang terjadi serta menemukan tersangkanya berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh. Dalam pelaksanaannya kegiatan penyidikan ini selain dilakukan oleh PPNS Bappebti sendiri juga dilakukan bekerjasama dengan aparat penegak hukum di daerah.

Capaian-5 :

Indeks

Kepuasan

4. Memberikan Konsultasi, Asistensi dan Pelayanan Hukum.

Indeks Kepuasan Layanan Pengaduan dan Konsultasi Hukum pada tahun 2024 tercapai dengan perolehan skor sebesar 92,28 (Sangat Baik) atau

Layanan	106,06% (seratus enam koma nol enam persen) dari target tahun 2024.
Pengaduan	Indikator ini merupakan indikator baru sehingga tidak dapat
dan	dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya. Namun, apabila
Konsultasi	dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023, indikator Indeks Kepuasan
Hukum	Layanan Pengaduan dan Konsultasi Hukum tercapai dengan perolehan skor sebesar 92,19 (Sembilan puluh dua koma sembilan belas empat) dari target 85 atau 108,45% (seratus delapan koma empat puluh lima persen) dari target tahun 2023. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2024 terjadi penurunan sebesar 3,59%. Apabila capaian Indeks Kepuasan Layanan Pengaduan dan Konsultasi Hukum dibandingkan dengan target tahun 2024 pada Lampiran Matriks Perubahan Kinerja Pembangunan Terhadap Perubahan Organisasi Kementerian Perdagangan Tahun 2022-2024 yaitu sebesar 87 maka Indeks Kepuasan Layanan Pengaduan dan Konsultasi Hukum tahun 2024 terhadap target 2024 sebesar 106,06 .

Pengelolaan Ketatausahaan Biro

Dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan dan tata usaha dan rumah tangga Biro berdasarkan pasal 244 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan di bentuk untuk mendukung Subbagian Tata Usaha Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti. Untuk mendukung kegiatan operasional Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan yang memiliki 3 (tiga) fungsi tugas lainnya maka kegiatan Pengelolaan Ketatausahaan Biro dibutuhkan dalam pelaksanaan urusan – urusan tata usaha dan rumah tangga Biro. Tahapan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Tata Usaha adalah Penyusunan Program, Penyusunan Rencana Kinerja, Melakukan Evaluasi Kinerja, Pengadministrasian Surat Masuk dan Surat Keluar Biro, Pengadministrasian Barang Milik Negara, Pengadministrasian Alat Tulis Kantor, Pemeliharaan Barang dan Aset Biro. Pada tahun 2024, laporan pelaksanaan pengelolaan Tata Usaha Biro telah dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) kali.

Tabel 4
Penyusunan Program dalam Ketatausahaan Biro tahun 2024

No.	Tempat	Tujuan
1.	Bandung	Menghadiri Undangan Sekretaris Bappebti melalui Surat Nomor: PR/00.01/24/BAPPEBTI.1/UND/01/2024 Tanggal 5 Januari 2024 mengenai Undangan Outlook Perdagangan Berjangka Komoditi dan Rapat Kerja Penyusunan Rencana Aksi Bappebti Tahun 2024
2.	Semarang	Menghadiri Undangan Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan melalui Surat Nomor: KP.09.15/056/SJ-DAG.10/UND/01/2024 Tanggal 12 Januari 2024 mengenai Undangan Rapat Pembahasan Target Output Kinerja Jabatan Fungsional Bidang Perdagangan
3.	Bandung	Menghadiri Undangan Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan melalui Surat Nomor: DL.00.02/148/SJ-DAG.10/UND.01/2024 Tanggal 26 Januari 2024 mengenai Perubahan Kompetensi Terintegrasi
4.	Depok	Menghadiri Undangan Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia melalui Surat Nomor: OT.00/122/SJ-DAG /UND/02/2024 tanggal 27 Februari 2024 mengenai Undangan Pembahasan Peta Resiko Tahun 2024
5.	Bandung	Menghadiri Undangan Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan melalui surat Nomor: KP.09.15/324/SJ-DAG.10/UND/02/2024 tanggal 27 Februari 2024 mengenai Undangan Rapat Finalisasi Target Output Kinerja Jabatan Fungsional Bidang Perdagangan
6.	Yogyakarta	Menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum berdasarkan surat Nomor: UD.01.00/2/BAPPEBTI.2/ST.RAKOR/04/2024 terkait dengan kegiatan ilegal di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi
7.	Bandung	Dalam Rangka Konsultasi Mengenai Persiapan Uji Kompetensi Perpindahan Jabatan Dan Kenaikan Jenjang, Serta Permasalahan Pengangkatan Pangkat Dan Jabatan Fungsional Bagi Peserta Yang Sudah Lulus Ujian Kompetensi Tahun 2023
8.	Bandung	Menghadiri Undangan Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan melalui Surat Nomor: KP.12.04/865/SJ-DAG.10/UND/06/2024 tanggal 6 Juni 2024 mengenai Rapat Persiapan Musyawarah Nasional Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan
9.	Bandung	Menghadiri Undangan Sekretaris Bappebti melalui Surat Nomor: TU.03/437/BAPPEBTI.1/UND/6/2024 tanggal 7 Juni 2024 mengenai Rapat Pendampingan Persiapan Evaluasi Zona Integritas Bappebti
10.	Yogyakarta	Menghadiri kegiatan kunjungan kerja (benchmarking) ke unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan yang pernah mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) untuk bertukar pengalaman dan diskusi menangani Zona Integritas berdasarkan surat Sekretaris Bappebti Nomor: OT.00/465/BAPPEBTI.1/ND/06/2024 tanggal 21 Juni 2024 perihal Kunjungan Kerja dalam rangka Evaluasi Zona Integritas Bappebti
11.	Depok	Menghadiri Undangan Plt. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia melalui surat Nomor: OT.00/515/SJ-DAG.2/UND/06/2024 tanggal 28 Juni 2024 mengenai Sosialisasi dan Bimtek Manajemen Risiko
12.	Bandung	Menghadiri Undangan Sekretaris Bappebti melalui surat Nomor: TU.03/537/BAPPEBTI.1/UND/07/2024 tanggal 19 Juli 2024 mengenai Pendampingan Persiapan Evaluasi Zona Integritas Tahun 2024 Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Bappebti

Sumber Data: Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti

Tabel 5
Realisasi Anggaran Biro Perundang-undangan dan Penindakan
Bappebti Tahun 2024

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI
1.	Meningkatnya hasil pelayanan hukum terhadap pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi,Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	Persentase Regulasi di Bidang Perdagangan Berjangka Komiditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas yang diuji Publik	422.761.00 0	420.882.85 6	99,55%
		Persentase Realisasi Pengenaan Sanksi atau Penindakan lebih lanjut Berdasarkan Rekomendasi Hasil Identifikasi, Pemeriksaan teknis, Pemeriksaan atau Penyidikan	1.342.273. 000	1.328.827. 953	98,99%
		Persentase Pemenuhan Konsultasi Hukum tentang Peraturan di Bidang PBK, SRG dan PLK	151.847.00 0	151.768.06 1	99,94%
		Persentase Pemenuhan Litigasi dan Penanganan Perselisihan	96.354.000	94.633.407	98,21%
		TOTAL	2.013.235. 000	1.996.112. 277	99.15%

Sumber data: Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan, Bappebti

BAB III

RENCANA KERJA TAHUN 2026

A. Visi dan Misi

VISI Sesuai dengan perencanaan strategis (Renstra) Bappebti yang telah disusun dengan mengacu pada visi Presiden tahun 2025-2029 yaitu " **Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas yang Maju dan Berkelanjutan Dalam Rangka Mewujudkan Perdagangan yang Ekspansif dan Terintegrasi Dengan Rantai Pasar Domestik dan Global**".

MISI Untuk dapat mewujudkan visi di atas, maka Kementerian Perdagangan memiliki tujuan yaitu "Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas", dan misi nya yaitu **Meningkatkan Kinerja PBK,SRG,PLK yang tangguh dan berkelanjutan pada periode 2025-2029 dan Menguatkan kapasitas kelembagaan Bappebti yang efektif dan efisien pada periode 2025-2029** serta dengan sasaran strategis yang salah satunya terkait dengan tugas dan fungsi Bappebti yaitu "Meningkatkan kinerja PBK,SRG dan PLK yang tangguh dan berkelanjutan pada periode 2025-2029"

B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

TUJUAN Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Bappebti, maka tujuan yang ingin dicapai pada periode 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya nilai tambah PBK,SRG dan PLK dalam mendukung peningkatan dan ketahanan pasar dalam negeri;
2. Terwujudnya peningkatan kontribusi PBK,SRG dan PLK terhadap perdagangan domestik;

3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bersih di lingkungan Bappebti.

Sedangkan yang menjadi tujuan Biro Perundang-undangan PBK, SRG, dan PLK adalah:

1. Penyusunan peraturan perundang-undangan yang komprehensif;
2. Peningkatan pelaksanaan identifikasi, pemeriksaan dan penyidikan secara cepat dan akurat, serta menetapkan sanksi yang tegas;
3. Penanganan proses perkara gugatan hukum di pengadilan;
4. Peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum.

**Sasaran Biro
Perundang -
undangan**

**PBK, SRG, dan
PLK 2026**

Sasaran strategis merupakan penjabaran tujuan organisasi Biro Perundang-undangan PBK, SRG, dan PLK Bappebti yang lebih spesifik dan terukur.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, Biro Perundang-undangan PBK, SRG, dan PLK BAPPEBTI menetapkan sasaran sebagai berikut:

“Meningkatnya Efektifitas Kebijakan dan pelayanan hukum di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi , Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas”

C. Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan

**Program
Bappebti**

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran, maka untuk mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi yang ada, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) memiliki **Program Peningkatan Perdagangan Berjangka Komoditi.**

**Biro
Perundang-
undangan
PBK, SRG, dan
PLK
Melaksanakan
Program
Meningkatnya
hasil**

Biro Perundang-undangan PBK, SRG, dan PLK sebagai unit eselon II di lingkungan Bappebti memiliki 1 (satu) kegiatan yaitu Meningkatkan hasil pelayanan hukum terhadap Pelaku Usaha di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas. Kegiatan tersebut dijabarkan dalam bentuk per output Biro Perundang-undangan PBK, SRG, dan PLK

pelayanan hukum terhadap Pelaku Usaha di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas yang dijabarkan dalam 4 Kegiatan

yang terdiri dari:

- **Output pertama Indeks Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan di Bidang PBK,SRG dan PLK yang di dukung 3 sub kegiatan yaitu:**

1. Peraturan Lainnya

A. Perumusan, penyempurnaan dan penyusunan peraturan Bappebti di Bidang PBK

Kegiatan ini ditujukan agar peraturan yang disusun dapat tepat sasaran maka Bappebti perlu Proses perumusan kebijakan dalam bentuk regulasi yang disusun agar tepat sasaran maka Bappebti dalam proses penyusunannya melakukan perumusan dengan melakukan kegiatan antara lain analisis kuesioner, studi literatur, interview dan sharing knowledge dengan pihak yang terkait termasuk melakukan pendalaman terhadap semua bahan/sumber referensi (buku / jurnal, laporan masyarakat, usulan pelaku pasar, usulan unit terkait, hasil kajian analisis, dan lainJain) yang berkaitan dengan substansi penyusunan kebijakan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Lelang Komoditas.

Keluaran (output) dari kegiatan perumusan, penyempurnaan dan penyusunan peraturan dibidang PBK yaitu adanya hasil perumusan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada serta tersusunnya peraturan yang lebih lengkap dan sesuai perkembangan, 4 **(empat)** Peraturan.

Adapun rincian rancangan Peraturan Bappebti di bidang PBK yang akan diterbitkan pada tahun 2026, sebagai berikut:

1. Peraturan Bappebti tentang Perubahan atas Peraturan Bappebti tentang Pedoman Penanganan Perselisihan Nasabah di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
2. Peraturan Bappebti tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Teknis dan Pemeriksaan di bidang

Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas;

3. Peraturan Bappebti tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan Berkala Penasihat Berjangka; dan
4. Peraturan Bappebti tentang Penjaminan dan Penyelesaian Transaksi Berbasis Teknologi pada Industri Perdagangan Berjangka Komoditi.

2. Peraturan Bappebti di bidang SRG dan PLK

1. Perumusan, penyempurnaan dan penyusunan peraturan SRG dan PLK

Pada proses ini Bappebti mengundang pihak internal dan eksternal untuk memberikan masukan atau tanggapan atas substansi pengaturan peraturan tersebut. Hasil dari uji publik tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menyempurnakan rancangan rumusan peraturan. Uji publik tersebut juga bermanfaat untuk mengetahui analisis kesesuaiannya agar peraturan tersebut harmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun rincian rancangan Peraturan Bappebti di bidang SRG dan PLK yang akan diterbitkan pada tahun 2026, sebagai berikut:

1. Peraturan Bappebti tentang Pedoman Perizinan Bagi Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas Dengan Penyerahan Kemudian (forward).

- Output kedua Penyelesaian Perselisihan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang sesuai dengan SLA yang di dukung 1 sub kegiatan yaitu:

1. Layanan penanganan perkara di badan peradilan/atau alternatif penyelesaian perselisihan di bidang PBK,SRG dan PLK

Kegiatan ini diarahkan untuk memberikan layanan pengaduan. Seringkali dalam investasi Perdagangan Berjangka Komoditi terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh karena itu Bappebti memberikan wadah sebagai pengaduan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

Penerima manfaat dari kegiatan layanan pengaduan dalam penanganan kasus Perdagangan Berjangka Komoditi dan Sistem Resi Gudang ini adalah masyarakat.

Keluaran (output) dari kegiatan layanan pengaduan dalam penanganan kasus PBK dan SRG ini adalah penanganan pengaduan masyarakat di Bidang PBK dan SRG.

Indikator kinerja output yang diharapkan adalah :

- Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti.

Kegiatan ini diarahkan untuk menangani setiap perkara gugatan hukum yang ditujukan kepada Bappebti dan menyelesaikan perkara gugatan tersebut.

Penerima manfaat dari kegiatan penanganan perkara gugatan hukum ini adalah Bappebti.

Keluaran (output) dari kegiatan Penanganan perkara gugatan hukum di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Sistem Resi Gudang ini adalah tertanganinya perkara gugatan hukum yakni dengan mengikuti proses jawab-jinawab di setiap persidangan, terdokumentasinya gugatan, jawaban, replik, duplik, barang bukti, pada setiap persidangan, dan adanya laporan hasil persidangan terhadap kurang lebih **5 (lima)** Penanganan dan Pendampingan Kasus/Gugatan Hukum di Bidang PBK dan SRG.

Indikator kinerja output yang diharapkan adalah :

- Jumlah penanganan perkara yang ditangani

BAB IV

PENUTUP

Biro Perundang-undangan PBK, SRG, dan PLK Bappebti mendukung program kegiatan Bappebti

Rencana kerja Biro Perundang-undangan PBK, SRG, dan PLK Bappebti tahun 2026 ini disusun dalam rangka menjaga kesinambungan arah dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan dan pengaturan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- Seluruh unit kerja di lingkungan Biro Perundang-undangan PBK, SRG, dan PLK Bappebti secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan rencana kerja tahun 2026 dengan sebaik-baiknya.
- Rencana kerja ini di dalamnya juga terdapat target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Biro Perundang-undangan PBK, SRG, dan PLK Bappebti tahun 2024 dan menjadi acuan bagi unit kerja di lingkungan Biro Perundang-undangan PBK, SRG, dan PLK Bappebti dalam melaksanakan kegiatan tahun 2026.
- Biro Perundang-undangan PBK, SRG, dan PLK Bappebti berkewajiban menjaga konsistensi antara rencana kerja tahun 2026 dengan rencana kerja unit-unit kerja di lingkungan Biro Perundang-undangan PBK, SRG, dan PLK Bappebti.
- Dalam rangka menjaga efektifitas pelaksanaan rencana kerja tahun 2026, seluruh bagian di lingkungan Biro Perundang-undangan PBK, SRG, dan PLK Bappebti berkewajiban melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana kerja tahun 2026 dalam keterkaitannya dengan Rencana Strategis Bappebti Kementerian Perdagangan Tahun 2026.

Selanjutnya, Rencana Kerja Biro Perundang-undangan PBK, SRG,

dan PLK Bappebti tahun 2026 ini segera dapat diimplementasikan dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran-sasaran yang terdapat dalam lampiran dokumen Rencana Kerja.

LAMPIRAN 1A

FORMULIR

RENCANA KERJA

RORUN PBK,SRG DAN PLK

TAHUN 2026

**FORMULIR RENCANA KERJA
BIRO PERUNDANG-UNDANGAN PBK, SRG, DAN PLK
TAHUN 2026**

SASARAN			
URAIAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET	SATUAN TARGET
Meningkatnya Efektivitas Kebijakan dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	Indeks Kualitas Kebijakan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	64	Nilai
	Penyelesaian Perselisihan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang sesuai dengan SLA	91	Persen (%)
	Indeks kepuasan layanan Penyelesaian Perselisihan dan Konsultasi Hukum	83	Nilai

Mengetahui, Desember 2025

**Kepala Biro Perundang-undangan
PBK, SRG, dan PLK,**



FRANCISKA SIMANJUNTAK

LAMPIRAN 2

FORMULIR

APLIKASI KRISNA BAPPENAS

TAHUN 2026

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2026

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERDAGANGAN
2. PROGRAM : EF - Program Perdagangan Dalam Negeri
3. SASARAN PROGRAM : 09 - Meningkatnya Kinerja Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas yang tangguh dan berkelanjutan
4. KEGIATAN : 3761 - Peningkatan Efektifitas Kebijakan dan Pelayanan Hukum
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 04 - Biro Perundang-undangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2026	ALOKASI 2026 (RIBU)
01	Meningkatnya Efektifitas Kebijakan dan pelayanan hukum di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi , Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas		525.000,0
01.01	Indeks Kualitas Kebijakan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	64	
01.02	Penyelesaian Perselisihan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang sesuai dengan SLA	91	
01.03	Indeks kepuasan layanan Penyelesaian Perselisihan dan Konsultasi Hukum	83	
Total			525.000,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	<i>Meningkatnya Efektifitas Kebijakan dan pelayanan hukum di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi , Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas</i>										525.000,0
01.AAH	Peraturan lainnya										262.500,0

01.AAH.001	Peraturan Bappebti di bidang PBK								000 - Bukan Tematik		170.900,0
------------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	-----------

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Perumusan, penyempurnaan dan penyusunan peraturan Bappebti di Bidang PBK										170.900,0
		Pusat	Pusat								170.900,0
01.AAH.002	Peraturan Bappebti di bidang SRG dan PLK								000 - Bukan Tematik		91.600,0
	051 - Perumusan, penyempurnaan dan penyusunan peraturan SRG dan PLK										91.600,0
		Pusat	Pusat								91.600,0
01.ABB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan										0,0
01.ABB.001	Rekomendasi Kebijakan sebagai dasar penyempurnaan peraturan di bidang PBK, SRG dan PLK								000 - Bukan Tematik		0,0
	051 - Pelaksanaan Legal Audit Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
01.ABB.002	Rekomendasi Kebijakan sebagai dasar pembentukan peraturan di bidang PBK, SRG dan PLK								000 - Bukan Tematik		0,0
01.AEA	Koordinasi										0,0
01.AEA.001	Koordinasi dalam rangka uji publik dan harmonisasi Kebijakan PBK, SRG dan PLK								000 - Bukan Tematik		0,0
01.BBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan										131.250,0
01.BBA.001	Layanan Asistensi hukum di bidang PBK, SRG dan PLK								000 - Bukan Tematik		131.250,0
	051 - Pengumpulan Data dan Informasi										0,0
		Pusat	Pusat								0,0

	052 - Pemberian Asistensi Hukum di Bidang PBK, SRG, dan PLK kepada Stakeholder/Pelaku Usaha/Instansi lain									131.250,0
		Pusat	Pusat							131.250,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	053 - Penyusunan Dokumen Asistensi Penanganan Kasus										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
01.BBA.002	Layanan penyelesaian perselisihan di bidang PBK, SRG dan PLK								000 - Bukan Tematik		0,0
01.BBA.003	Layanan konsultasi hukum dibidang PBK,SRG dan PLK								000 - Bukan Tematik		0,0
01.BCB	Perkara Hukum Lembaga										131.250,0
01.BCB.001	Layanan penanganan perkara di badan peradilan/atau alternatif penyelesaian perselisihan di bidang PBK,SRG dan PLK								000 - Bukan Tematik		131.250,0
	051 - Penanganan perkara di badan peradilan/atau alternatif penyelesaian perselisihan di bidang PBK,SRG dan PLK										131.250,0
		Pusat	Pusat								131.250,0
01.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga										0,0
01.BDB.001	Fasilitasi dan Pembinaan terkait implementasi ketentuan di bidang PBK, SRG dan PLK								000 - Bukan Tematik		0,0
01.BDB.002	Fasilitasi dan Pembinaan terkait penyelesaian perselisihan di bidang PBK, SRG dan PLK								000 - Bukan Tematik		0,0
	051 - Pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait pelaksanaan penyelesaian perselisihan yang melibatkan pelaku usaha di bidang PBK, SRG, dan PLK										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	052 - Pengumpulan Data dan Informasi										0,0

		Pusat	Pusat								0,0
	053 - Evaluasi dan Rekapitulasi penanganan pengaduan di bidang PBK, SRG, dan PLK										0,0
		Pusat	Pusat								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat										0,0
01.BDC.001	Fasilitasi dan Pembinaan terkait Informasi hukum atas implementasi di bidang PBK, SRG dan PLK								000 - Bukan Tematik		0,0
Total											525.000,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01	Meningkatnya Efektifitas Kebijakan dan pelayanan hukum di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi , Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas				525.000,0				0,0	0,0	0,0
01.AAH	Peraturan lainnya		peraturan/ Rancangan Peraturan/ Surat Keputusan		262.500,0				0,0	0,0	0,0
01.AAH.001	Peraturan Bappebti di bidang PBK	2	peraturan		170.900,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0
01.AAH.001.051	Perumusan, penyempurnaan dan penyusunan peraturan Bappebti di Bidang PBK	2,0	Peraturan	85.450,0	170.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AAH.002	Peraturan Bappebti di bidang SRG dan PLK	1	peraturan		91.600,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.AAH.002.051	Perumusan, penyempurnaan dan penyusunan peraturan SRG dan PLK	1,0	peraturan	91.600,0	91.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		Rekomendasi Kebijakan		0,0				0,0	0,0	0,0
01.ABB.001	Rekomendasi Kebijakan sebagai dasar penyempurnaan peraturan di bidang PBK, SRG dan PLK	0	Rekomendasi Kebijakan		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.ABB.001.051	Pelaksanaan Legal Audit Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi	0,0	Rekomendasi Kebijakan	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

01.ABB.002	Rekomendasi Kebijakan sebagai dasar pembentukan peraturan di bidang PBK, SRG dan PLK	0	Rekomendasi Kebijakan		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.AEA	Koordinasi		kegiatan		0,0				0,0	0,0	0,0
01.AEA.001	Koordinasi dalam rangka uji publik dan harmonisasi Kebijakan PBK, SRG dan PLK	0	kegiatan		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01.BBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		Orang		131.250,0				0,0	0,0	0,0
01.BBA.001	Layanan Asistensi hukum di bidang PBK, SRG dan PLK	6	Orang		131.250,0	6	6	6	0,0	0,0	0,0
01.BBA.001.051	Pengumpulan Data dan Informasi	0,0	Dokumen	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BBA.001.052	Pemberian Asistensi Hukum di Bidang PBK, SRG, dan PLK kepada Stakeholder/Pelaku Usaha/Instansi lain	6,0	Dokumen	21.875,0	131.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BBA.001.053	Penyusunan Dokumen Asistensi Penanganan Kasus	0,0	Dokumen	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BBA.002	Layanan penyelesaian perselisihan di bidang PBK, SRG dan PLK	0	Orang		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.BBA.003	Layanan konsultasi hukum dibidang PBK,SRG dan PLK	0	Orang		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.BCB	Perkara Hukum Lembaga		Perkara		131.250,0				0,0	0,0	0,0
01.BCB.001	Layanan penanganan perkara di badan peradilan/atau alternatif penyelesaian perselisihan di bidang PBK,SRG dan PLK	5	Perkara		131.250,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.BCB.001.051	Penanganan perkara di badan peradilan/atau alternatif penyelesaian perselisihan di bidang PBK,SRG dan PLK	5,0	Perkara	26.250,0	131.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		Lembaga		0,0				0,0	0,0	0,0
01.BDB.001	Fasilitasi dan Pembinaan terkait implementasi ketentuan di bidang PBK, SRG dan PLK	0	Lembaga		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.BDB.002	Fasilitasi dan Pembinaan terkait penyelesaian perselisihan di bidang PBK, SRG dan PLK	0	Lembaga		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.BDB.002.051	Pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait pelaksanaan penyelesaian perselisihan yang melibatkan pelaku usaha di bidang PBK, SRG, dan PLK	0,0	Laporan	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BDB.002.052	Pengumpulan Data dan Informasi	0,0	Laporan	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BDB.002.053	Evaluasi dan Rekapitulasi penanganan pengaduan di bidang PBK, SRG, dan PLK	0,0	Laporan	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		Orang		0,0				0,0	0,0	0,0

01.BDC.001	Fasilitasi dan Pembinaan terkait Informasi hukum atas implementasi di bidang PBK, SRG dan PLK	0	Orang		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Total					525.000,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01	Meningkatnya Efektifitas Kebijakan dan pelayanan hukum di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi , Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas		525.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	525.000,0
01.AAH	Peraturan lainnya		262.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	262.500,0
01.AAH.001	Peraturan Bappebti di bidang PBK		170.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170.900,0
01.AAH.001.051	Perumusan, penyempurnaan dan penyusunan peraturan Bappebti di Bidang PBK	Utama	170.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170.900,0
01.AAH.002	Peraturan Bappebti di bidang SRG dan PLK		91.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91.600,0
01.AAH.002.051	Perumusan, penyempurnaan dan penyusunan peraturan SRG dan PLK	Utama	91.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91.600,0
01.ABB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABB.001	Rekomendasi Kebijakan sebagai dasar penyempurnaan peraturan di bidang PBK, SRG dan PLK		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABB.001.051	Pelaksanaan Legal Audit Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABB.002	Rekomendasi Kebijakan sebagai dasar pembentukan peraturan di bidang PBK, SRG dan PLK		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AEA	Koordinasi		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AEA.001	Koordinasi dalam rangka uji publik dan harmonisasi Kebijakan PBK, SRG dan PLK		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AEA.001.051	Pelaksanaan uji publik dan harmonisasi kebijakan PBK,SRG dan PLK	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		131.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131.250,0
01.BBA.001	Layanan Asistensi hukum di bidang PBK, SRG dan PLK		131.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131.250,0
01.BBA.001.051	Pengumpulan Data dan Informasi	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BBA.001.052	Pemberian Asistensi Hukum di Bidang PBK, SRG, dan PLK kepada Stakeholder/Pelaku Usaha/Instansi lain	Utama	131.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131.250,0
01.BBA.001.053	Penyusunan Dokumen Asistensi Penanganan Kasus	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BBA.002	Layanan penyelesaian perselisihan di bidang PBK, SRG dan PLK		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BBA.003	Layanan konsultasi hukum dibidang PBK,SRG dan PLK		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

01.BCB	Perkara Hukum Lembaga		131.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131.250,0
01.BCB.001	Layanan penanganan perkara di badan peradilan/atau alternatif penyelesaian perselisihan di bidang PBK,SRG dan PLK		131.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131.250,0
01.BCB.001.051	Penanganan perkara di badan peradilan/atau alternatif penyelesaian perselisihan di bidang PBK,SRG dan PLK	Utama	131.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131.250,0
KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BDB.001	Fasilitasi dan Pembinaan terkait implementasi ketentuan di bidang PBK, SRG dan PLK		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BDB.001.051	Pertemuan Teknis Implementasi Ketentuan	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BDB.002	Fasilitasi dan Pembinaan terkait penyelesaian perselisihan di bidang PBK, SRG dan PLK		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BDB.002.051	Pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait pelaksanaan penyelesaian perselisihan yang melibatkan pelaku usaha di bidang PBK, SRG, dan PLK	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BDB.002.052	Pengumpulan Data dan Informasi	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BDB.002.053	Evaluasi dan Rekapitulasi penanganan pengaduan di bidang PBK, SRG, dan PLK	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BDC.001	Fasilitasi dan Pembinaan terkait Informasi hukum atas implementasi di bidang PBK, SRG dan PLK		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total			525.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	525.000,0

Mengetahui, Desember 2025

Kepala Biro Perundang-undangan
PBK, SRG, dan PLK,


FRANCISKA SIMANJUNTAK

REKAP 3A: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2026

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERDAGANGAN
2. PROGRAM : EF - Program Perdagangan Dalam Negeri
3. SASARAN PROGRAM : 09 - Meningkatnya Kinerja Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas yang tangguh dan berkelanjutan
4. KEGIATAN : 3761 - Peningkatan Efektifitas Kebijakan dan Pelayanan Hukum
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 04 - Biro Perundang-undangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2026	ALOKASI 2026 (RIBU)
01	Meningkatnya Efektifitas Kebijakan dan pelayanan hukum di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi , Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas		525.000,0
01.01	Indeks Kualitas Kebijakan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	64	
01.02	Penyelesaian Perselisihan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang sesuai dengan SLA	91	
01.03	Indeks kepuasan layanan Penyelesaian Perselisihan dan Konsultasi Hukum	83	
Total			525.000,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	Meningkatnya Efektifitas Kebijakan dan pelayanan hukum di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi , Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas										525.000,0
01.AAH	Peraturan lainnya										262.500,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.AAH.001	Peraturan Bappebti di bidang PBK								000 - Bukan Tematik		170.900,0
	051 - Perumusan, penyempurnaan dan penyusunan peraturan Bappebti di Bidang PBK										170.900,0
		Pusat	Pusat								170.900,0
01.AAH.002	Peraturan Bappebti di bidang SRG dan PLK								000 - Bukan Tematik		91.600,0
	051 - Perumusan, penyempurnaan dan penyusunan peraturan SRG dan PLK										91.600,0
		Pusat	Pusat								91.600,0
01.ABB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan										0,0
01.ABB.001	Rekomendasi Kebijakan sebagai dasar penyempurnaan peraturan di bidang PBK, SRG dan PLK								000 - Bukan Tematik		0,0
	051 - Pelaksanaan Legal Audit Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
01.ABB.002	Rekomendasi Kebijakan sebagai dasar pembentukan peraturan di bidang PBK, SRG dan PLK								000 - Bukan Tematik		0,0
01.AEA	Koordinasi										0,0
01.AEA.001	Koordinasi dalam rangka uji publik dan harmonisasi Kebijakan PBK, SRG dan PLK								000 - Bukan Tematik		0,0
01.BBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan										131.250,0
01.BBA.001	Layanan Asistensi hukum di bidang PBK, SRG dan PLK								000 - Bukan Tematik		131.250,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Pengumpulan Data dan Informasi										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	052 - Pemberian Asistensi Hukum di Bidang PBK, SRG, dan PLK kepada Stakeholder/Pelaku Usaha/Instansi lain										131.250,0
		Pusat	Pusat								131.250,0
	053 - Penyusunan Dokumen Asistensi Penanganan Kasus										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
01.BBA.002	Layanan penyelesaian perselisihan di bidang PBK, SRG dan PLK								000 - Bukan Tematik		0,0
01.BBA.003	Layanan konsultasi hukum dibidang PBK,SRG dan PLK								000 - Bukan Tematik		0,0
01.BCB	Perkara Hukum Lembaga										131.250,0
01.BCB.001	Layanan penanganan perkara di badan peradilan/atau alternatif penyelesaian perselisihan di bidang PBK,SRG dan PLK								000 - Bukan Tematik		131.250,0
	051 - Penanganan perkara di badan peradilan/atau alternatif penyelesaian perselisihan di bidang PBK,SRG dan PLK										131.250,0
		Pusat	Pusat								131.250,0
01.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga										0,0
01.BDB.001	Fasilitasi dan Pembinaan terkait implementasi ketentuan di bidang PBK, SRG dan PLK								000 - Bukan Tematik		0,0
01.BDB.002	Fasilitasi dan Pembinaan terkait penyelesaian perselisihan di bidang PBK, SRG dan PLK								000 - Bukan Tematik		0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait pelaksanaan penyelesaian perselisihan yang melibatkan pelaku usaha di bidang PBK, SRG, dan PLK										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	052 - Pengumpulan Data dan Informasi										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	053 - Evaluasi dan Rekapitulasi penanganan pengaduan di bidang PBK, SRG, dan PLK										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
01.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat										0,0
01.BDC.001	Fasilitasi dan Pembinaan terkait Informasi hukum atas implementasi di bidang PBK, SRG dan PLK								000 - Bukan Tematik		0,0
Total											525.000,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01	Meningkatnya Efektifitas Kebijakan dan pelayanan hukum di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi , Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas				525.000,0				0,0	0,0	0,0
01.AAH	Peraturan lainnya		peraturan/ Rancangan Peraturan/ Surat Keputusan		262.500,0				0,0	0,0	0,0
01.AAH.001	Peraturan Bappebti di bidang PBK	2	peraturan		170.900,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01.AAH.001.051	Perumusan, penyempurnaan dan penyusunan peraturan Bappebti di Bidang PBK	2,0	Peraturan	85.450,0	170.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AAH.002	Peraturan Bappebti di bidang SRG dan PLK	1	peraturan		91.600,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.AAH.002.051	Perumusan, penyempurnaan dan penyusunan peraturan SRG dan PLK	1,0	peraturan	91.600,0	91.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		Rekomendasi Kebijakan		0,0				0,0	0,0	0,0
01.ABB.001	Rekomendasi Kebijakan sebagai dasar penyempurnaan peraturan di bidang PBK, SRG dan PLK	0	Rekomendasi Kebijakan		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.ABB.001.051	Pelaksanaan Legal Audit Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi	0,0	Rekomendasi Kebijakan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABB.002	Rekomendasi Kebijakan sebagai dasar pembentukan peraturan di bidang PBK, SRG dan PLK	0	Rekomendasi Kebijakan		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.AEA	Koordinasi		kegiatan		0,0				0,0	0,0	0,0
01.AEA.001	Koordinasi dalam rangka uji publik dan harmonisasi Kebijakan PBK, SRG dan PLK	0	kegiatan		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.BBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		Orang		131.250,0				0,0	0,0	0,0
01.BBA.001	Layanan Asistensi hukum di bidang PBK, SRG dan PLK	6	Orang		131.250,0	6	6	6	0,0	0,0	0,0
01.BBA.001.051	Pengumpulan Data dan Informasi	0,0	Dokumen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BBA.001.052	Pemberian Asistensi Hukum di Bidang PBK, SRG, dan PLK kepada Stakeholder/Pelaku Usaha/Instansi lain	6,0	Dokumen	21.875,0	131.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BBA.001.053	Penyusunan Dokumen Asistensi Penanganan Kasus	0,0	Dokumen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BBA.002	Layanan penyelesaian perselisihan di bidang PBK, SRG dan PLK	0	Orang		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.BBA.003	Layanan konsultasi hukum dibidang PBK,SRG dan PLK	0	Orang		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.BCB	Perkara Hukum Lembaga		Perkara		131.250,0				0,0	0,0	0,0
01.BCB.001	Layanan penanganan perkara di badan peradilan/atau alternatif penyelesaian perselisihan di bidang PBK,SRG dan PLK	5	Perkara		131.250,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01.BCB.001.051	Penanganan perkara di badan peradilan/atau alternatif penyelesaian perselisihan di bidang PBK,SRG dan PLK	5,0	Perkara	26.250,0	131.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		Lembaga		0,0				0,0	0,0	0,0
01.BDB.001	Fasilitasi dan Pembinaan terkait implementasi ketentuan di bidang PBK, SRG dan PLK	0	Lembaga		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.BDB.002	Fasilitasi dan Pembinaan terkait penyelesaian perselisihan di bidang PBK, SRG dan PLK	0	Lembaga		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.BDB.002.051	Pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait pelaksanaan penyelesaian perselisihan yang melibatkan pelaku usaha di bidang PBK, SRG, dan PLK	0,0	Laporan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BDB.002.052	Pengumpulan Data dan Informasi	0,0	Laporan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BDB.002.053	Evaluasi dan Rekapitulasi penanganan pengaduan di bidang PBK, SRG, dan PLK	0,0	Laporan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		Orang		0,0				0,0	0,0	0,0
01.BDC.001	Fasilitasi dan Pembinaan terkait Informasi hukum atas implementasi di bidang PBK, SRG dan PLK	0	Orang		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Total					525.000,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										TOTAL
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	
01	Meningkatnya Efektifitas Kebijakan dan pelayanan hukum di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi , Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas		525.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	525.000,0
01.AAH	Peraturan lainnya		262.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	262.500,0
01.AAH.001	Peraturan Bappebti di bidang PBK		170.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170.900,0
01.AAH.001.051	Perumusan, penyempurnaan dan penyusunan peraturan Bappebti di Bidang PBK	Utama	170.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170.900,0
01.AAH.002	Peraturan Bappebti di bidang SRG dan PLK		91.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91.600,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.AAH.002.051	Perumusan, penyempurnaan dan penyusunan peraturan SRG dan PLK	Utama	91.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91.600,0
01.ABB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABB.001	Rekomendasi Kebijakan sebagai dasar penyempurnaan peraturan di bidang PBK, SRG dan PLK		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABB.001.051	Pelaksanaan Legal Audit Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABB.002	Rekomendasi Kebijakan sebagai dasar pembentukan peraturan di bidang PBK, SRG dan PLK		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AEA	Koordinasi		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AEA.001	Koordinasi dalam rangka uji publik dan harmonisasi Kebijakan PBK, SRG dan PLK		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AEA.001.051	Pelaksanaan uji publik dan harmonisasi kebijakan PBK,SRG dan PLK	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		131.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131.250,0
01.BBA.001	Layanan Asistensi hukum di bidang PBK, SRG dan PLK		131.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131.250,0
01.BBA.001.051	Pengumpulan Data dan Informasi	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BBA.001.052	Pemberian Asistensi Hukum di Bidang PBK, SRG, dan PLK kepada Stakeholder/Pelaku Usaha/Instansi lain	Utama	131.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131.250,0
01.BBA.001.053	Penyusunan Dokumen Asistensi Penanganan Kasus	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BBA.002	Layanan penyelesaian perselisihan di bidang PBK, SRG dan PLK		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BBA.003	Layanan konsultasi hukum dibidang PBK,SRG dan PLK		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BCB	Perkara Hukum Lembaga		131.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131.250,0
01.BCB.001	Layanan penanganan perkara di badan peradilan/atau alternatif penyelesaian perselisihan di bidang PBK,SRG dan PLK		131.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131.250,0
01.BCB.001.051	Penanganan perkara di badan peradilan/atau alternatif penyelesaian perselisihan di bidang PBK,SRG dan PLK	Utama	131.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131.250,0
01.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BDB.001	Fasilitasi dan Pembinaan terkait implementasi ketentuan di bidang PBK, SRG dan PLK		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BDB.001.051	Pertemuan Teknis Implementasi Ketentuan	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.BDB.002	Fasilitasi dan Pembinaan terkait penyelesaian perselisihan di bidang PBK, SRG dan PLK		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BDB.002.051	Pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait pelaksanaan penyelesaian perselisihan yang melibatkan pelaku usaha di bidang PBK, SRG, dan PLK	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BDB.002.052	Pengumpulan Data dan Informasi	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BDB.002.053	Evaluasi dan Rekapitulasi penanganan pengaduan di bidang PBK, SRG, dan PLK	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BDC.001	Fasilitasi dan Pembinaan terkait Informasi hukum atas implementasi di bidang PBK, SRG dan PLK		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total			525.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	525.000,0

Jakarta, Desember 2025

Kepala Biro Perundang-undangan
PBK, SRG, dan PLK,

FRANCISKA SIMANJUNTAK